

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Instansi pemerintahan merupakan organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk mengkoordinasikan negara dan kepentingannya. Instansi pemerintah pada umumnya didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka instansi pemerintahan juga bertujuan untuk memberikan layanan sebagai organisasi nirlaba, dan terdapat peluang untuk meningkatkan layanan tersebut di masa depan.

Setiap pemerintahan daerah memiliki hak otonomi daerah berupa wewenang kekuasaan atas wilayah dan pemerintahan suatu daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan nasional, pelayanan serta fasilitas publik yang baik dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pemerintahan Daerah diharapkan dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan efisien guna pembiayaan program atau kegiatan daerah secara maksimal dan pemenuhan kebutuhan daerah.

Auliyah et al. (2020) sebagai entitas sektor publik, Pemerintah Daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan anggaran dan penganggaran. Anggaran daerah yang tertuang dalam APBD adalah inti penting dari keuangan (akuntansi) pemerintahan, karena anggaran merupakan informasi keuangan penting yang dihasilkan oleh pemerintah.

Siregar (2017:6) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Legislatif.

Menurut Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014), penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada konsep desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan, pemerintah provinsi serta kota dibangun serta diatur selaku wilayah otonom. Pemerintah Daerah ialah lembaga yang mempunyai tugas guna mengendalikan roda pemerintahan di wilayah, pembangunan wilayah, pembangunan wilayah, serta membagikan pelayanan kepada warga luas. Anggaran ialah salah satu bagian paling utama dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan.

Pemerintah daerah membutuhkan APBD sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada periode tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) ialah rencana kerja pemerintah berbentuk laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sebagaimana diamanatkan Undang- Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara serta Undang- Undang No 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan serta Belanja Tahun Anggaran (TA) 2013, menteri ataupun pimpinan lembaga selaku pengguna Anggaran ataupun Barang memiliki tugas antara lain menyusun serta meyampaikan laporan keuangan Departemen Negara ataupun Lembaga yang dipimpinnya

Dalam APBD terdapat komponen yang terdiri atas Belanja dan Pendapatan Daerah. Belanja daerah mencakup pembagian anggaran untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya. Sementara itu, pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, dana alokasi umum, serta pendapatan asli daerah. Ini sangat berdampak signifikan pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi.

Sementara itu Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas salah satunya ialah laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterbitkan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan daerah. Dibandingkan dengan neraca, laporan pelaksanaan anggaran mempunyai prioritas lebih tinggi dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang disusun sebelum diwajibkan menyusun neraca dan laporan arus kas.

Dilihat dari *Website* [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) mengenai Laporan Realisasi Anggaran terdapat beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah dimana pendapatan APBD pada daerah tersebut mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel Realisasi Anggaran PAD, Pendapatan Transfer dan total Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah periode 2018-2022.



**Gambar I. 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar)**

Pada Grafik diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan PAD antara Daerah Kabupaten / Kota Magelang dan Pekalongan. Pada Kota Magelang tiap tahunnya mengalami peningkatan PAD. Berbeda dengan Kabupaten Magelang yang tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurun PAD. Pada Kota Pekalongan di tahun 2020 justru mengalami kenaikan padahal pada tahun tersebut terdapat wabah atau virus Covid-19 tetapi PAD Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan untuk tahun berikutnya justru mengalami penurunan kembali. Pada Kabupaten Pekalongan pun ditahun 2020 mengalami kenaikan tetapi tahun berikutnya juga megalami kenaikan dan tidak terjadi penurunan kembali. Terdapat beberapa hal yang membuat PAD Kabupaten dan Kota Pekalongan mengalami kenaikan, salah satunya adalah kenaikan pajak daerah di Tahun 2020 sebagaimana telah di jelaskan oleh website resmi [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) yang

mengakibatkan PAD Kab/Kota Pekalongan meningkat secara drastis. Kemudian pada tahun 2021-2022 pajak daerah tersebut mulai berjalan secara normal kembali sehingga dapat meringankan biaya pajak daerah bagi warga setempat.

Kemudian setelah menjelaskan tentang kenaikan dan penurunan Grafik Pendapatan Asli Daerah diatas, berikut adalah tabel Grafik dan penjelasan tentang Pendapatan Transfer Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022.



**Gambar I. 2 Grafik Pendapatan Transfer Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar)**

Dari Grafik diatas, diketahui bahwa pada Kota Salatiga mendapatkan Pendapatan Transfer yang paling rendah dibanding Kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada Kota Semarang, kota yang mendapatkan Pendapatan Transfer yang paling banyak dari Kota lainnya. Dapat diketahui juga bahwa Kota Semarang adalah Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah, dan juga Kota Semarang menjadi kota besar dengan pemulihan perekonomian tercepat di Pulau Jawa pada masa pandemi Covid-19. Pemulihan perekonomian Kota Semarang juga lebih tinggi dibanding dengan DKI Jakarta. Sedangkan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan dan penurunan pada Pendapatan Transferynya. Dapat disimpulkan juga bahwa semua Pendapatan Transfer yang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 yang dimana pada tahun tersebut adanya virus Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian pada tiap Kabupaten dan Kota menurun.

Setelah menjelaskan tentang Pendapatan Transfer Daerah, selanjutnya menjelaskan tentang peningkatan atau penurunan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022. Berikut adalah tabel Grafik Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar I. 3 Grafik Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar)**

Pada Gambar diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan total Belanja Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Kab Cilacap mengalami Belanja Daerah yang paling tinggi. Disisi lain dilihat dari tabel diatas yang mengalami penurunan belanja daerah paling rendah adalah Kota Surakarta pada tahun 2020. Sama halnya dengan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 , yang mengalami penuruan adalah di tahun 2020 karena pada tahun tersebut adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan Perekonomian daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Motivasi penulis dalam penelitian ini adalah keinginan untuk memahami perkembangan Realisasi antara Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia khususnya pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Menurut Faud (2016: 19), laporan realisasi anggaran adalah diagram yang memungkinkan perbandingan anggaran dan pelaksanaan anggaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuan laporan kinerja anggaran adalah untuk memberikan informasi pembanding mengenai unit pelaporan dan kinerja anggaran. Membandingkan hasil anggaran dan eksekutif menunjukkan tingkat implementasi tujuan yang disepakati antara legislatif dan eksekutif menurut undang-undang. Laporan pelaksanaan anggaran disajikan dengan cara yang menyoroti berbagai elemen seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang tepat.

Mengingat sumber pendanaan pemerintah daerah kemungkinan besar berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka diperlukan analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah. Menganalisis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan hal yang penting untuk memahami kinerja keuangan daerah. Untuk mengukur laporan keuangan pemerintah daerah, penulis menggunakan Microsoft Excel untuk membandingkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Doni Aulia (2023) menyimpulkan bahwa perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Jambi dengan provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 berdasarkan Rasio Drajat Desentralisasi, Provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sejenis hanya saja peneliti melakukan penelitian pada analisis Pendapatan Daerah, PAD, Pendapatan Transfer dan total semua Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Daerah, PAD, Pendapatan Transfer, dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 ?
2. Bagaimana perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 jika dilihat menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?

### **1.3. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Daerah, PAD, Pendapatan Transfer, dan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022, jika dilihat menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis , diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai analisis pendapatan dan belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran dengan menggunakan analisis Rasio Ketergantungan Daerah dan analisis Rasio Efisiensi Belanja.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, serta mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

## 2) Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan saran dalam memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja pendapatan dan belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran guna mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja pada pendapatan dan belanja daerah.

## 3) Bagi Universitas Putra Bangsa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi penelitian berikutnya bagi Mahasiswa Universitas Putra Bangsa.

